

Daftar Pustaka

Buku

- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 2007, *Dinamika Koperasi*, Rineka Cipta, Jakarta
- Faudy, Munir, 2010, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hadjon, Philipus M. 1993, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartasaputra, G., 2001, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lontoh, Rudhy A., Denny Kailimang dan Benny Pontoh, 2001, *Penyelesaian Utang Piutang melalui Kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, 1987, *Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Armico, Bandung.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020, *Proses Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Setelah Putusan Pernyataan Pailit dan Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Sanjaya, Umar Haris, 2014, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam Hukum Kepailitan*, NFP Publishing, Yogyakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2015, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan: Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Kencana, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sugiyono, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sulaiman, Robinton dan Joko Prabowo, 2000, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan (Tinjauan Yuridis: Tanggung Jawab Komisaris, Direksi dan Pemegang*

Saham Terhadap Perusahaan Pailit), Karawaci, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Suyatno, Anton 2012, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta

Waluyo, Bernadette, 1999, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mandar Maju, Bandung.

Wijayanta, Tata, 2016, *Undang-Undang dan Praktik Kepailitan: Perbandingan Indonesia dan Malaysia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Jurnal

Fajarwati, Merina, “Validitas Surat Edara Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14, No.02, Juni 2017, hlm. 145-162.

Hadiwardoyo, Wibowo, “Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19”, *Journal of Business and Entrepreneurship*, Vol. 2, No. 2, April 2020, hlm. 83-92.

Lumbanraja, Anggita Doramia, “Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19”, *Jurnal Crepido*, Vol. 02, No. 01, Juli 2020, hlm. 46-58.

Yuniagara, Riki, Eddy Purnama, dan M.S. Sjafei, “Kekuatan Hukum Mengikat SEMA No. 7 Tahun 2014 tentang Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali dalam Perkara Pidana”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 1, April 2017, hlm. 117-136.

Wijayanta, Tata, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 14, No. 2, Mei 2014, hlm. 216-226.

—, “Kajian Tentang Pengaturan Syarat Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004”, *Mimbar Hukum*, Vol. 26, No. 1, Februari 2014, hlm. 1-13.

Wijayanta, Tata dan Erma Putriyana Defiana, “Kajian Hukum Tentang Penerapan Pembuktian Sederhana Dalam Perkara Kepailitan Asuransi”, *Mimbar Hukum*, Vol. 22, No. 3, Oktober 2010, hlm. 482-497.

Hasil Penelitian/Tugas Akhir

Cahyadi, Irwan Adi, 2014, *Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dalam Hukum Positif di Indonesia*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Charisma, Dhanistha, 2019, *Upaya Pengembalian Dana Investor Melalui Sita Umum Pada Kepailitan Pandawa Mandiri Group Menurut Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Skripsi, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung

Makalah/Pidato

Pramono, Nindyo, “Gagal Bayar Akibat Pandemi Covid-19 dari Perspektif Hukum Kepailitan”, *Pidato*, Seminar online BLC, 24 Juni 2020.

Wijaya, GP. Aji, “Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU)”, *Pidato*, Pendidikan Kurator dan Pengurus Angkatan XXVI Tahun 2019 oleh AKPI pada Hotel Sari Pacific, Jakarta, 28 Oktober 2019.

Internet

Dian Kurniati, “Singgung Soal Penanganan Covid-19, Ini Pidato Lengkap Ketua DPR RI”, https://news.ddtc.co.id/singgung-soal-penanganan-covid-19-ini-pidato-lengkap-ketua-dpr-ri-23134?page_y=3600, diakses pada 29 September 2020.

Hamalatul Qur’ani, “Menanti Keseragaman Mekanisme Sidang PKPU dan Kepailitan di Masa Pandemi”, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e9a71132fc98/menanti-keseragaman-mekanisme-sidang-pkpu-dan-kepailitan-di-masa-pandemi>, diakses pada tanggal 12 November 2020.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Sekjen MK, Keselamatan Warga Hukum Tertinggi”, <https://mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16326>, diakses pada tanggal 11 November 2020.

Muhammad Fasabeni, “SEMA tak sejalan dan Lemah Melawan Putusan MK”, <https://www.gresnews.com/berita/hukum/98385-sema-pembatasan-pk-dianggap-tak-bertentangan-putusan-mk/>, diakses pada 10 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (Dalam PKPU) Sekaligus Undangan Rapat Kreditor Serta Sidang Permusyawaratan Majelis

Hakim”, <https://www.kreditor-indosurya.com/pengumuman>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Penyerahan: Berita Acara Rapat Pemungutan Suara, pada tanggal 15 Juli 2020, Pkl.19.39, di Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/48213058/penyerahan-berita-acara-rapat-pemungutan-suara-pada-tanggal-15-juli-2020-pkl-1939-di-pengadilan-niaga-pada-pengadilan-negeri-jakarta-pusat>, diakses pada 30 Agustus 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Ringkasan Rapat Kreditor (Pertama)”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/45885558/ringkasan-rapat-kreditor-pertama>, diakses pada 28 Oktober 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Resume Laporan Tim Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta (dalam PKPU) sampai dengan Tanggal 20 Mei 2020”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/46334079/resume-laporan-tim-pengurus-koperasi-simpan-pinjam-indosurya-cipta-dalam-pkpu-sampai-dengan-tanggal-20-mei-2020>, diakses pada 28 Oktober 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Pemberitahuan Penting Terkait Rapat Pencocokan Piutang dan Verifikasi”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/46326015/pemberitahuan-penting-terkait-rapat-pencocokan-piutang-dan-verifikasi>, diakses pada 3 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Pengumuman terkait Pra-Pencocokan Piutang”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/46833695/pengumuman-terkait-pra-pencocokan-piutang>, diakses pada 3 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Proses Pra Pencocokan Para Kreditor”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/46921214/proses-pra-pencocokan-para-kreditor>, diakses pada 4 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Kreditor yang Belum Diakui dan Perlu Hadir di Rapat Pencocokan Besok”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/47334180/kreditor-yang-belum-diakui-dan-perlu-hadir-di-rapat-pencocokan-besok>, diakses pada 4 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Proposal Perdamaian Debitor – Disampaikan melalui email pada hari Sabtu, tanggal 13 Juni 2020”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/47228900/proposal-perdamaian-debitor-disampaikan-melalui-email-pada-hari-sabtu-tanggal-13-juni-2020>, diakses pada 4 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Surat Undangan Rapat Kreditor”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/47522883/surat-undangan-rapat-kreditor>, diakses pada 6 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Undangan Debitor kepada Kreditor terkait Presentasi Rencana Perdamaian”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/47676785/undangan-debitor-kepada-kreditor-terkait-presentasi-rencana-perdamaian>, diakses pada 6 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Pengumuman terkait Rapat Kreditor”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/47781736/pengumuman-terkait-rapat-kreditor>, diakses pada 6 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Jadwal Voting Rencana Perdamaian”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/47954044/jadwal-voting-rencana-perdamaian>, diakses pada 6 November 2020.

Tim Pengurus Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang KSP Indosurya, “Mekanisme Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian”, <https://www.kreditor-indosurya.com/berita-terbaru/c/0/i/47972314/mekanisme-pemungutan-suara-voting-rencana-perdamaian>, diakses pada 6 November 2020.

Universitas Islam Indonesia, “Dampak Pandemi Covid-19 di Bidang Sosial dan Hukum”, <https://www.uui.ac.id/dampak-pandemi-covid-19-di-bidang-sosial-dan-hukum/>, diakses pada tanggal 27 Agustus 2020.

Vendy Yhulia Susanto, “Jumlah Perkara PKPU di pengadilan meningkat, ini saran ke pemerintah”, <https://nasional.kontan.co.id/news/jumlah-perkara-pkpu-di-pengadilan-meningkat-ini-saran-ke-permintah>, diakses pada 28 Agustus 2020.

World Health Organization, “COVID-19 Situation Dashboard in Indonesia”, <https://covid19.who.int/region/searo/country/id>, diakses pada 29 September 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 tentang Susunan, Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 30)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1995 tentang Surat Kuasa Khusus

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst perihal Permohonan PKPU Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta, 29 April 2020.

Wawancara

Baskara, Duta, 2020, Implikasi dan Kedudukan SEMA 1/2020 dalam perkara PKPU, *Wawancara*, Jakarta, 4 November.

Djono, Anthony, 2020, Mekanisme Rapat-Rapat Kreditor Selama Jangka Waktu PKPU Sementara dan Perbedaannya Setelah Pandemi COVID-19, *Wawancara*, Jakarta, 27 Oktober.

Siregar, Budi, 2020, Perpanjangan Jangka Waktu Pemeriksaan PKPU Akibat Pandemi COVID-19, *Wawancara*, Jakarta, 28 Juni.

Siregar, Budi, 2020, Mekanisme Rapat-Rapat Kreditor Selama Jangka Waktu PKPU Sementara dan Perbedaannya Setelah Pandemi COVID-19, *Wawancara*, Jakarta, 31 Oktober.

Lain-lain

Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 20 Mei 2020.

Penetapan Hakim Pengawas Nomor: 66/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt.Pst tertanggal 26 Mei 2020.

Rencana Perdamaian Koperasi Simpan Pinjam Indosurya Cipta tertanggal 29 Juni 2020.